

## **PENGAJIAN PENINGKATAN DAYA SAING USAHA KECIL MENENGAH YANG BERBASIS PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL (2002)**

Pasal 33 UUD 1945 mengamanatkan bahwa perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi dan berpihak pada rakyat. Selaras dengan pasal 33 UUD 1945, GBHN Tahun 1999 menekankan berjalannya demokrasi ekonomi dengan meningkatkan kemampuan koperasi dan usaha kecil serta menengah. Amanat GBHN tahun 1999 tersebut tersurat dalam arah kebijakan ekonomi butir II, yaitu memberdayakan pengusaha kecil, menengah, dan koperasi agar lebih efisien, produktif, dan berdaya saing dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif dan peluang usaha yang seluas-luasnya. Arah kebijakan ekonomi butir II merupakan dukungan perkuatan kepada pengusaha kecil, menengah, dan koperasi, perlindungan dari persaingan yang tidak sehat, memberikan pendidikan dan pelatihan, informasi bisnis dan pelatihan, dukungan teknologi, permodalan, dan lokasi usaha yang strategis.

UKM pada masa krisis ekonomi pada tahun 1997 telah membuktikan perannya sebagai katup pengaman perekonomian nasional. Pada tahun 2000, BPS mencatat sumbangan koperasi dan UKM terhadap pendapatan nasional mencapai 56,3 persen, sedangkan sisanya berasal dari kelompok ekonomi besar dan konglomerasi. Sektor ekonomi kerakyatan tidak dapat dianggap kecil, tetapi dapat dipandang sebagai suatu potensi yang besar. Upaya yang dapat dilakukan agar UKM memiliki daya saing, antara lain dengan menjalin kerjasama dengan usaha besar atau sesama UKM, penciptaan keunggulan kompetitif, manajemen yang tepat, teknologi tepatguna, dan inovasi yang berkesinambungan. Kebijakan pengembangan UKM masih mengalami distorsi, sehingga tujuan dan sasaran belum tercapai secara optimal. Untuk mengetahui berbagai kondisi riil yang melemahkan daya saing UKM, maka dilakukan kajian yang mendalam untuk menemukan solusi dalam rangka meningkatkan daya saing UKM berbasis ekonomi lokal.

Pengkajian ini bertujuan untuk mengkaji komoditas unggulan daerah yang memiliki potensi untuk ditingkatkan daya saingnya dan mengkaji model-model pengembangan ekonomi lokal dalam meningkatkan daya saingnya. Adapun sasaran yang diharapkan antara lain: a) terinventarisasinya dan teridentifikasi model pengembangan ekonomi lokal; b) tersedianya model pengembangan ekonomi lokal sebagai masukan pada pimpinan/instansi dan lembaga terkait dalam merumuskan kebijakan. Diharapkan dari kajian ini dapat memberikan model dan rekomendasi untuk menyusun kebijakan peningkatan daya saing UKM yang berbasis pada pengembangan ekonomi lokal.

Kajian literatur menunjukkan antara lain: a) sampai saat ini semua teori pembangunan yang ada memfokuskan pada pengurangan kemiskinan, pedesaan, polarisasi sosial serta perubahan pola pikir; b) terminologi lokal atau daerah ekonomi menggambarkan area geografis suatu kekuasaan pemerintahan; c) daya saing adalah kemampuan suatu usaha untuk menciptakan keseimbangan baru.

Kajian ini mengungkapkan persepsi *stakeholders* mengenai peningkatan daya saing UKM berbasis pengembangan ekonomi lokal. Untuk itu, variabel penelitian ini meliputi: a) faktor yang mempengaruhi perkembangan ekonomi lokal, mencakup PAD, APBD, PDRB, dan jumlah tenaga kerja; b) komoditas unggulan, berupa keunggulan kompetitif dan komparatif; c) sentra, meliputi nilai investasi, jumlah unit usaha, jumlah tenaga kerja, nilai bahan baku, dan nilai produksi; d) UKM di wilayah sentra, mencakup aspek tenaga kerja, produksi, permodalan, pemasaran, persaingan, dan kewirausahaan.

Responden penelitian ini antara lain: a) Dinas koperasi dan UKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, BAPPEDA dan DPRD; b) Pengurus sentra sebanyak 21 sampai 50 orang; c) UKM di lingkungan sentra 75 sampai 250 unit, d) Perbankan, Dekopin,

LSM, pers dan asosiasi; e) Perguruan Tinggi. Penelitian dilakukan di 7 provinsi: Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, NTB, dan Kalimantan Selatan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui: a) diskusi dengan PKM, gerakan koperasi, asosiasi PKM, Kadin, PT, LSM, pakar, dan Pemda; b) kuesioner; c) wawancara, d) kajian kepustakaan. Analisis data dengan menggunakan alat-alat analisis probit/logit. Analisis daya saing menggunakan pendekatan analisis deskriptif dan pendekatan *effective rate of protection* (ERP), *domestic resources costs* (DRC), dan *reveal comparative advantage* (RCA).

Berdasarkan hasil kajian dan analisis data diperoleh kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut :

1. Indikator pengembangan ekonomi lokal secara umum tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perkembangan kinerja sentra UKM yang diukur dengan laju pertumbuhan nilai tambah dan produktivitasnya. Hal ini mengindikasikan belum adanya keterkaitan yang berarti antara dinamika perkembangan ekonomi lokal dengan sentra UKM.
2. Kebijakan fiskal pemerintah kabupaten/kota secara umum tidak terpengaruh secara signifikan terhadap perkembangan kinerja sentra UKM di daerahnya, kecuali untuk daerah provinsi Sumatera Utara dan Jawa Timur. Hal ini mengindikasikan prioritas pengeluaran pembangunan di daerah umumnya belum diberikan kepada sentra UKM dan cenderung memprioritaskan pada pembangunan lainnya. Untuk itu, Kementerian Koperasi dan UKM perlu menstimulir dan mengkoordinasikan pemerintah kabupaten/kota untuk mengembangkan sentra UKM di wilayahnya. Hal ini dapat ditempuh dengan pengalokasian dana pengembangan sentra UKM untuk suatu daerah (MAP, BDS-P, pelatihan dan lain-lain), didasarkan pada ketersediaan dana padanan di daerah, kecuali

untuk daerah yang minus. Untuk itu, perlu ditetapkan parameter penganggaran untuk pembangunan sentra pada masa mendatang.

3. Hasil kajian mengindikasikan hampir seluruh daerah kabupaten/kota telah menetapkan komoditas unggulan daerah. Proses penentuan komoditas unggulan umumnya didasarkan pada kapasitas produksi tanpa mencoba mengkaji keunggulan bersaing dari komoditas tersebut dibandingkan daerah lainnya. Hal ini menyulitkan bagi pemerintah daerah untuk menstimulir pengembangan komoditas unggulannya, karena ketidakjelasan variabel yang harus distimulir untuk mengembangkan daya saing komoditas tersebut. Untuk itu, Kementerian Koperasi dan UKM perlu mengkoordinasikan kebijakan penentuan komoditas unggulan dan andalan daerah yang kriterianya didasarkan pada konsep keunggulan bersaing, sehingga akan memudahkan pemerintah kabupaten/kota dalam menstimulir pengembangan komoditas unggulan daerahnya.
4. Efisiensi teknis UKM yang berada di dalam sentra relatif lebih tinggi dibandingkan efisiensi teknis UKM di luar sentra. Hal ini akibat proses pembinaan UKM yang berada di dalam sentra oleh berbagai instansi pemerintah relatif lebih intensif dibandingkan dengan UKM di luar sentra (nonsentra). Namun, UKM di luar sentra menggunakan tenaga kerja lebih rasional dibandingkan UKM di dalam sentra. Penggunaan tenaga kerja di dalam sentra UKM cenderung lebih jenuh, sehingga penambahannya dapat berdampak mengurangi produktivitas dari sentra UKM tersebut.
5. Sentra dengan jumlah UKM lebih dari 30 orang pengusaha, relatif lebih dinamis daripada sentra yang memiliki UKM di bawah 30 orang. Namun demikian, sentra yang kecil umumnya memiliki efisiensi teknis yang lebih baik dibandingkan sentra yang besar. Hal ini mengindikasikan pola pembinaan sentra UKM selama ini tidak berkesinambungan. Untuk itu, Kementerian Koperasi dan

UKM perlu merumuskan pola pembinaan sentra UKM yang berkesinambungan serta mensosialisasikan upaya pembinaan sentra UKM tersebut kepada pemerintah kabupaten/kota agar mampu membina sentra UKM secara berkesinambungan melalui BDS-P. Penggunaan BDS-P sebagai stimulan dan fasilitator pengembangan sentra UKM dinilai sangat tepat secara konseptual karena hubungan UKM dengan BDS-P didasarkan pada hubungan bisnis, sehingga akan lebih terjamin kontinuitas pembinaannya.

6. Kinerja UKM yang berada dalam sentra yang telah maju relatif lebih baik dibandingkan dengan UKM yang berada dalam sentra yang belum maju. Hasil kajian mengindikasikan sentra yang dinamis di Indonesia umumnya memiliki kriteria sebagai berikut :
  - Jumlah UKM di dalam sentra rata-rata di atas 37 orang pengusaha kecil dan menengah;
  - Jumlah omzet penjualan atau nilai produksi dari seluruh UKM di dalam sentra rata-rata di atas Rp 2.737.500.000,00 per tahun;
  - Jumlah tenaga kerja di dalam sentra rata-rata 147 orang;
  - Jumlah tambahan investasi di dalam sentra rata-rata di atas Rp 52.000.000,00 per tahun.
7. Fungsi produksi sentra UKM mengindikasikan faktor produksi investasi berada pada *stage* II (elastisitas positif kurang dari 1), sedang jumlah UKM dan penggunaan bahan baku berada pada *stage* III (elastisitas negatif), sedang penggunaan tenaga kerja telah mencapai titik jenuh (elastisitas nol). Implikasinya, hanya variabel investasilah yang dapat dijadikan pemicu pengembangan sentra UKM, sedang variabel lainnya telah mencapai atau melampaui titik jenuhnya. Untuk itu, program MAP, penjaminan, dan proses sertifikasi tanah UKM (seperti PRONA) diduga akan dapat menjadi stimulan pengembangan sentra UKM di Indonesia.
8. Elastisitas jumlah UKM dan bahan baku yang negatif juga merupakan indikasi belum adanya sinergi antar-UKM dan

sentra, yang mengakibatkan UKM belum dapat memanfaatkan skala ekonomis dalam kegiatan usahanya, yang seharusnya dapat diperoleh karena bekerja di dalam suatu sentra. Untuk itu, Kementerian Koperasi dan UKM perlu merumuskan dan mensosialisasikan pola kerja sama antar-UKM di dalam sentra dan kerjasama UKM antar-sentra, serta kerjasama antara UKM dan pelaku usaha lainnya.

9. Mengacu pada butir 8 di atas, hampir seluruh faktor produksi telah jenuh (elastisitas nol atau negatif), maka inovasi dan teknologi menjadi kunci bagi pengembangan sentra UKM pada masa mendatang. Untuk itu, pengembangan pasar sentra dan BDS serta peningkatan kualitas BDS-P diharapkan mampu memberikan sumbangan yang berarti untuk memberdayakan proses inovasi dan penerapan teknologi yang sesuai untuk UKM yang berada di dalam sentra. Implikasinya, Kementerian Koperasi dan UKM secara berkesinambungan mendorong pengembangan pasar sentra dan BDS, baik dari sisi permintaan dan sisi penawaran. Sisi permintaan dapat didorong dengan mendekatkan BDS-P dengan sentra dan mengembangkan program “voucher”. Pada sisi penawaran, Kementerian Koperasi dan UKM perlu mengembangkan program peningkatan kualitas BDS-P dan program akreditasi serta sertifikasi BDS-P di Indonesia. Hasil observasi lapangan mengindikasikan kualitas sumberdaya manusia BDS-P yang ada relatif masih menjadi kendala untuk pengembangan pasar sentra dan BDS serta pengembangan sentra-sentra UKM.
10. Hasil kajian mengindikasikan adanya perbedaan antara sentra UKM di Jawa dan luar Jawa, sehingga pola pembinaannya pun seharusnya berbeda antara sentra UKM di Jawa dan luar Jawa. Pengembangan sentra UKM di Jawa dapat difokuskan pada upaya inovasi teknologi, stimulan investasi, peningkatan jumlah unit usaha, dan akses

bahan baku. Pada sentra di luar Jawa dapat difokuskan upaya peningkatan kualitas SDM UKM, akses pemasaran, inovasi teknologi dan investasi.

11. Hasil observasi menunjukkan :
  - Tingkat pendidikan pengelola UKM sentra rata-rata Sekolah Menengah Atas (SMA);
  - Sebagian besar UKM memiliki tenaga kerja antara 1 sampai dengan 10;
  - Tingkat pendidikan tenaga kerja UKM sebagian besar SMP dan SMA;
  - Keterampilan tenaga kerja tergolong rendah, kecuali di provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur;
  - Bahan baku yang digunakan UKM bersumber dari alam dan lokal;
  - Modal rata-rata sebesar Rp 10 juta, kecuali untuk provinsi Sumatera Utara dan Kalimantan Selatan rata-rata Rp 21 juta;
  - Modal awal dan modal kerja bersumber dari dana pribadi;
  - UKM kesulitan dalam mengakses dana dari lembaga keuangan karena prosedur yang relatif berbelit-belit dan memerlukan agunan;
  - Wilayah pemasaran produk yang dihasilkan UKM rata-rata pada lingkup lokal;
  - Teknologi yang digunakan UKM dalam proses produksi tergolong tradisional.
12. Berdasarkan pendapat dari Dinas Koperasi dan UKM, Bappeda, dan FGD, kriteria komoditas unggulan sebagai berikut :
  - Menggunakan bahan baku lokal;
  - Sesuai dengan potensi dan kondisi daerah;
  - Memiliki pasar yang luas;
  - Mampu menyerap tenaga kerja relatif banyak;
  - Merupakan sumber pendapatan masyarakat;
  - Volume produksi relatif besar dan kontinyu;

- Merupakan ciri khas daerah;
  - Memiliki daya saing yang relatif tinggi;
  - Memiliki nilai tambah relatif tinggi;
  - Dapat memacu perkembangan komoditas yang lain.
13. Model peningkatan daya saing UKM menekankan pada usaha pembentukan klaster UKM. Klaster UKM tersebut didukung oleh: a) sumberdaya alam dan manusia serta perekonomian lokal; b) program kemitraan; dan c) dukungan perkuatan berupa keuangan dan non-keuangan. Dukungan perkuatan tersebut bersumber dari pemerintah pusat/lokal, lembaga keuangan, BUMN/BUMD, dan swasta. Keberadaan klaster UKM tersebut diharapkan membantu UKM dalam mengakses pasar, peningkatan kemampuan ekspor, menciptakan keunggulan kompetitif, dan memanfaatkan teknologi informasi.